

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan wabah virus corona di Republik Rakyat Tiongkok sebagai darurat kesehatan global. Asia Tenggara adalah salah satu wilayah pertama yang terkena dampak karena kedekatan geografis dan perjalanan bisnis, pariwisata, dan hubungan rantai pasokan ke China. Pada tanggal 4 Mei 2020, terdapat 3.529.808 kasus di seluruh dunia dan lebih dari 49.900 kasus di Asia Tenggara. Jumlah kasus terkonfirmasi masih meningkat di wilayah tersebut, namun laju peningkatannya umumnya melambat. Penguncian nasional dan peningkatan karantina komunitas yang diterapkan di sejumlah negara secara bertahap dilonggarkan di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan kegiatan ekonomi mulai meningkat. Namun, pembatasan perjalanan bagi pengunjung asing tetap diberlakukan. Singapura dan Vietnam telah menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penahanan untuk mengatasi wabah Covid-19 yang mencakup *test and trace* atau pengujian dan pelacakan yang dapat memberikan panduan ke negara lain di kawasan ini (WHO, 2020).

Bank Pembangunan Asia (ADB) merevisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk negara ASEAN dari 4,4% pada 2019 menjadi 1% pada April 2020 (ADB, 2020). Perekonomian Asia Tenggara sudah mengalami dampak negatif dari ketegangan perdagangan global ketika virus menyerang. Kawasan ini sekarang akan menghadapi prospek guncangan dan resesi global. Perekonomian Asia Tenggara yang telah terkena dampak gangguan pasokan dan perdagangan dari Tiongkok serta penurunan tajam dalam pariwisata internasional selanjutnya dipengaruhi oleh penguncian dan tindakan pembatasan sosial yang diambil oleh banyak

negara yang memperlambat kegiatan ekonomi di banyak sektor ekonomi (Ecoscope, 2020).

Pemerintah Asia Tenggara telah memperkenalkan paket stimulus dengan memobilisasi baik fiskal dan langkah-langkah moneter untuk mengurangi dampak ekonomi tersebut. Ditingkat regional, retreat Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-26 pada 10 Maret 2020 mengeluarkan pernyataan menyerukan tindakan kolektif untuk mengurangi dampak virus, dengan fokus khusus pada pemanfaatan teknologi dan perdagangan digital, serta *platform* fasilitasi perdagangan untuk mendorong konektivitas dan keberlanjutan rantai pasokan. Disusul dengan Upaya KTT Khusus ASEAN tentang Covid-19 yang diselenggarakan pada 14 April 2020, para pemimpin Negara ASEAN mengeluarkan pernyataan menyerukan rencana pemulihan pasca-pandemi dan mengusulkan pembentukan Covid-19 *ASEAN Response Fund* (ASEAN Stat, 2022).

Implikasi penyebaran Covid-19 di Tiongkok telah menimbulkan efek yang mengganggu rantai pasokan global dan regional. Hal tersebut dikarenakan China adalah mitra dagang dan investor eksternal terbesar negara ASEAN. Pada tahun 2018, China memiliki pangsa 17,1% dari total perdagangan Asia Tenggara, dan berkontribusi 6,5% terhadap total aliran masuk FDI ke wilayah tersebut (ASEANstats, 2022). Rantai pasokan Asia Tenggara juga sangat terintegrasi dengan sektor manufaktur China. Negara-negara lain yang secara signifikan terkena dampak wabah tersebut adalah AS dan Uni Eropa (UE) termasuk mitra dagang dan investasi lainnya. WTO memperkirakan bahwa perdagangan dunia diperkirakan turun antara 13% dan 32% pada tahun 2020, melebihi penurunan yang disebabkan oleh Krisis Keuangan Global (WTO, 2020).

Pemerintah negara ASEAN memberlakukan langkah-langkah penahanan domestik yang ketat. Pembatasan berskala besar terhadap restoran dan rekreasi, serta penutupan dan penutupan sekolah yang berdampak negatif pada kegiatan ekonomi. Malaysia, Filipina, dan Thailand

juga memberlakukan kebijakan tersebut yang berdampak pada perlambatan bahkan berhentinya kegiatan ekonomi dan sektoral lainnya.

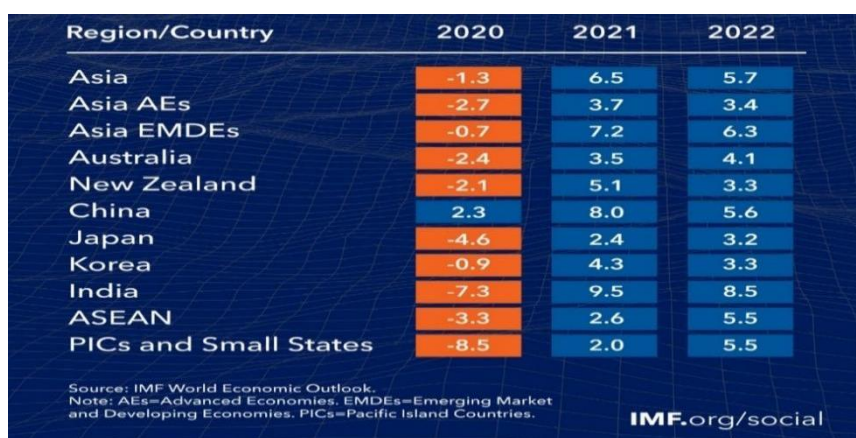
**Tabel 1.1 Prakiraan pertumbuhan PDB ASEAN tahun 2020**

<b>Negara</b>	<b>Prakiraan Awal</b>		<b>Revisi Prakiraan</b>		<b>Sumber</b>
<b>Brunei Darussalam</b>	1,5%	September 2019	2%	3 April 2020	ADB
<b>Kamboja</b>	6,8%	September 2019	2,3%	3 April 2020	ADB
<b>Indonesia</b>	5,3%	Agustus 2019	-0,4 hingga 2,3%	1 April 2020	Kementrian Keuangan
<b>Laos</b>	6,2%	September 2019	3,5%	3 April 2020	ADB
<b>Malaysia</b>	4,8%	Official Target	3,2% hingga 4,2% -2% hingga 0,5%	Februari 2020  3 April 2020	Kementrian Keuangan Bank Negara Malaysia
<b>Myanmar</b>	6,8%	September 2019	4,2%	3 April 2020	ADB
<b>Filipina</b>	6,5% hingga 7,5%	Official Target	-0,6% hingga 4,3%	19 Maret 2020	NEDA
<b>Singapura</b>	0,5% hingga 2,5%	November 2019	-4% hingga -1%	26 Maret 2020	Ministry of Trade and Industry
<b>Thailand</b>	2,8%	Desember 2019	-5,3%	8 April 2020	Bank of Thailand

<b>Vietnam</b>	6,8%		6,09 hingga 6,27%	9 Maret 2020	Ministry of Planning and Investment
----------------	------	--	-------------------------	-----------------	---

Sumber: ASEAN Policy Brief (2020)

Prospek pertumbuhan terhambat di kawasan karena konsekuensi ekonomi dalam Tabel 1.1. Pertumbuhan pada 2020-2024 di ASEAN diperkirakan rata-rata sebesar 4,9%, menurut *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2020* (OECD, 2019). Namun, dengan meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh wilayah, prospek pertumbuhan diperkirakan akan sangat memburuk. Penurunan tajam harga minyak menambah gejolak yang dipicu oleh wabah Covid-19.



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia**

Sumber : IMF World Economic Outlook (2021)

Berdasarkan data (IMF, 2021), ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi -3,3% pada tahun 2020, sedangkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 2,6% dan tahun 2022 mencapai angka 5,5%. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut lebih unggul di atas kawasan Indopasifik, India, dan Jepang. Tahun berikutnya 2021, ASEAN masih mengungguli Indopasifik dan Jepang yang mencapai angka 2% dan 2,4%. Sedangkan tahun 2022, ASEAN mengungguli *Asia Advance Economics* (AES) yang mencapai pertumbuhan ekonomi 3,4%, Australia 4,1%,

Selandia Baru 3,3%, Jepang 3,2%, dan Korea 3,3%. Kawasan Indopasifik pada tahun 2022 berhasil menyamai pertumbuhan ekonomi ASEAN yang mencapai 5,5%.

ASEAN mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang aktif. Hampir semua negara melonggarkan sikap kebijakan moneter mereka. Beberapa otoritas melakukan intervensi berkali-kali sejak awal infeksi COVID-19 dengan memotong suku bunga acuan mereka, menurunkan rasio cadangan wajib, menyiapkan dana untuk memfasilitasi pinjaman kepada perusahaan yang terkena dampak, penghentian sementara pembayaran pokok/bunga pinjaman, pengecualian pinjaman terkait Covid-19 dari perhitungan rasio pinjaman bermasalah atau penurunan biaya bank (Baldwin, 2020).

Selain reaksi kebijakan moneter, banyak negara juga meluncurkan paket stimulus fiskal komprehensif yang ditujukan untuk mendukung bisnis dan rumah tangga. Komposisi paket bervariasi menurut negara, tetapi mencakup subsidi keuangan, penangguhan dan pembebasan pajak, serta peningkatan belanja langsung. Secara keseluruhan, komposisi, waktu, dan penargetan paket stimulus sangat penting untuk menghasilkan efek peningkatan pertumbuhan yang diinginkan. Banyak negara telah menerapkan kebijakan yang ditargetkan untuk mendukung sektor-sektor yang rentan seperti UMKM. Akses pembiayaan untuk UMKM telah difasilitasi di banyak negara melalui pinjaman berbunga rendah (misalnya Indonesia, Kamboja, Malaysia, dan Myanmar), penangguhan dan keringanan pembayaran kembali pinjaman (misalnya Malaysia, Thailand), penyesuaian peraturan kehati-hatian untuk memungkinkan pinjaman tambahan bagi UMKM, jaminan pemerintah atas pinjaman (misalnya Malaysia), dan penilaian kredit yang lebih mudah dan ringan (misalnya Indonesia) (Worldbank, 2021).

Negara ASEAN juga telah menerapkan langkah-langkah untuk meringankan beban keuangan dan prosedural dari iuran jaminan sosial dan fiskal. Langkah-langkah tersebut mencakup perpanjangan batas waktu

pembayaran/deklarasi pajak, pengurangan dan pembebasan pajak tertentu, perpanjangan batas waktu pembayaran jaminan sosial, kontribusi yang lebih rendah untuk pemberi kerja dan karyawan, dan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan keuangan oleh perusahaan yang terdaftar serta harga utilitas publik juga diturunkan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek dalam menghadapi dampak dan ancaman yang ditimbulkan dari pandemic COVID-19. Menurut (Todaro, 2012) dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu: (i) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia; (ii) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; (iii) kemajuan teknologi.

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN 2017 – 2021**

Country	2017	2018	2019	2020	2021
Brunei Darussalam	1,3	0,1	3,9	1,1	-1,6
Cambodia	7,0	7,5	7,1	-3,1	3,0
Indonesia	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7
Lao PDR	6,9	6,3	5,5	3,3	3,5
Malaysia	5,8	4,8	4,4	-5,6	3,1
Myanmar	6,8	6,8	6,2	3,2	-5,9
Philippines	6,9	6,3	6,1	-9,6	5,6
Singapore	4,7	3,7	1,1	-4,1	7,6
Thailand	4,2	4,2	2,2	-6,2	1,5
Viet Nam <sup>21</sup>	6,8	7,1	7,0	2,9	2,6
<b>ASEAN</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>4,7</b>	<b>-3,2</b>	<b>3,4</b>

Sumber: <https://data.aseanstats.org/indicator/AST.STC.TBL.6> (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki rata-rata 3,1%.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan pencapaian 5,4% dan terendah pada tahun 2020 hingga mencapai angka minus 3,2% akibat pandemic COVID-19. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Vietnam dengan angka 5,3% dan terendah adalah Brunei Darussalam dengan rata-rata 1%. Pada saat pandemic COVID-19 yang terjadi tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh negara ASEAN mengalami penurunan ekonomi yang sangat signifikan. Dimulai dari Brunei Darussalam yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 2,8%, Kamboja turun 10,2%, Indonesia turun 7,1%, Laos menurun 2,2%, Malaysia turun 10%, Myanmar menurun 3%, Filipina turun 15,7%, Singapura turun 5,7%, Thailand menurun 8,4% dan Vietnam menurun 4,1%. Dari kesepuluh negara tersebut, Filipina, Kamboja, Malaysia dan Thailand yang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa negara berada dalam level negative/minus seperti Kamboja (-3,1%), Indonesia (-2,1%), Malaysia (-5,6%), Filipina (-9,6%), Singapura (-4,1%) dan Thailand (-6,2%).

Ancaman COVID-19 ini telah mengganggu stabilitas ekonomi yang memberikan efek domino terhadap aspek kehidupan masyarakat secara luas. Terlebih lagi terhadap aspek kesejahteraan sosial dan pertahanan negara yang berkaitan dengan kuantitas jumlah penduduk suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kependudukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Jhingan dalam Wardhana et al., 2020). Penduduk sebagai motorik dalam roda perekonomian mengalami pertumbuhan yang cepat di dunia. Pertumbuhan penduduk ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian seperti dialami oleh negara-negara berkembang beberapa negara ASEAN. Implikasi dari penduduk yang dilihat dari segi ukuran, pengembangan dan kualitas sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang layak di masa yang akan datang (Aidi dalam Wardhana et al., 2020).

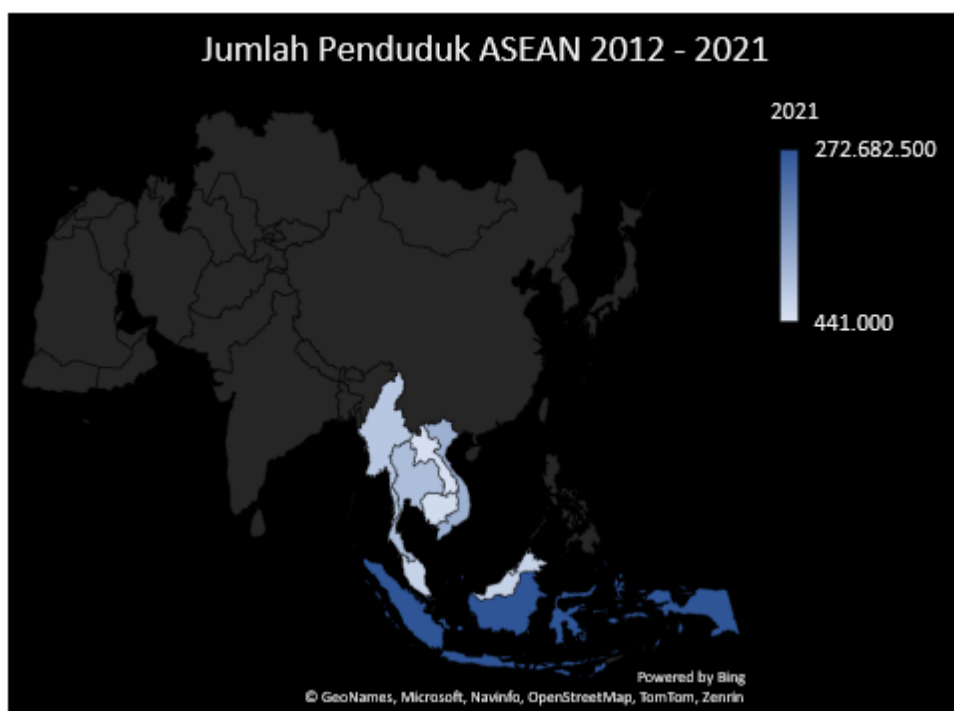
Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi yaitu kelahiran, kematian, perpindahan (Bappenas,2020). Pertumbuhan penduduk menurut Lucas, Donald & Young dalam Wardhana et al., (2020) dipengaruhi oleh tiga elemen utama yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi. Tingkat fertilitas memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk atau menambah jumlah penduduk, sedangkan tingkat mortalitas memberikan pengaruh negatif atau faktor pengurang terhadap laju pertumbuhan penduduk. Migrasi penduduk yang telah mencapai pendidikan tersier mungkin akan meninggalkan negara dan menggunakan keterampilan dan kecerdasan mereka untuk membantu pengembangan negara lain yang berdampak terhadap penurunan perekonomian di suatu negara (Stephen, et al 2003). Dinamika penduduk tersebut dapat mempengaruhi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah penduduk semakin besar maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya akan menjadi beban bagi suatu negara jika kualitas penduduknya rendah dan menghambat pembangunan.

Sebenarnya permasalahan yang muncul dibidang kependudukan bukan hanya pada jumlah yang besar semata akan tetapi juga berimbas pada turunan dari kuantitas yang besar tersebut antara lain adalah persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk yang sebagian besar masih muda, modal dan teknologi yang dimiliki juga masih rendah dan akibatnya produktivitas kerja makin menurun serta masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan (Rochaida, 2016).

Penduduk di suatu negara dapat diartikan menjadi dua, yakni orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal pada daerah tersebut. Menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2, penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing

yang tinggal di Indonesia. Dalam buku Teori Kependudukan (2021) oleh Agustin Bidarti, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Seiring berkembangnya sebuah negara, jumlah penduduk juga terus bertumbuh.

Negara ASEAN, termasuk Indonesia didalamnya, berada di urutan ketiga dengan ekonomi yang paling padat penduduknya setelah Cina dan India. Dengan total GDP sekitar US\$ 3.08 triliun di 2020, ASEAN kini menjadi ekonomi dengan urutan kelima terbesar di dunia dan diproyeksikan akan naik menjadi urutan keempat dunia di 2030. Setidaknya jumlah penduduk ASEAN mencapai 662 juta dengan pembangunan kota di area rural yang pesat. Pada 2030, populasi di Kawasan ini akan mencapai 717 juta dengan ekspansi urban tercepat, terutama di Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam (Fatimah, 2021).



**Gambar 1.2 Jumlah Penduduk ASEAN 2012 – 2021**

Sumber: Tradingeconomic (2023)

Berdasarkan gambar 1.2 diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk terbanyak di ASEAN dengan jumlah 272

juta orang pada tahun 2021, kedua adalah Filipina dengan jumlah penduduk mencapai 113 juta orang, Vietnam 96 juta orang, Thailand 71 juta orang, Myanmar 53 juta orang, Malaysia 32 juta orang, Kamboja 16 juta orang, Laos 7,3 juta orang, Singapura 5,9 juta orang, dan Brunei Darussalam 441 ribu orang. Meski terjadi pandemic COVID-19, jumlah penduduk di ASEAN mengalami pertumbuhan dari -2% hingga 1,68% per tahunnya.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ledakan penduduk, dan akan menimbulkan suatu kondisi lingkungan dengan kepadatan penduduk tinggi, dikarenakan penambahan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan penambahan jumlah luas wilayah ataupun distribusi penduduk yang merata di seluruh daerah, maka akan terjadi suatu ledakan penduduk. Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, sebab adanya kepadatan penduduk yang tinggi akan banyak menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah kependudukan misalnya kemiskinan, perumahan, lapangan pekerjaan dan lain-lain (Soekanto, 2015).

Adanya permasalahan yang timbul tersebut akan membawa dampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Sebagai akibat dari penambahan penduduk yang begitu cepat adalah terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan alam dan fasilitas kehidupan yang tersedia. Secara umum penduduk yang terlalu padat akan memberi tekanan yang besar terhadap lingkungan sejalan dengan timbulnya masalah perluasan pemukiman, meningkatnya kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, pangan, pelayanan kesehatan dan menurunnya mutu itu sendiri. Seperti dalam tabel 1.5 berikut ini:

**Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk ASEAN**

No	Negara	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah/Km <sup>2</sup>	Kepadatan Penduduk/Km <sup>2</sup>
1	Singapura	5.941.060	710	8.368
2	Filipina	113.880.328	342.353	333
3	Vietnam	97.468.029	331.212	294
4	Indonesia	272.682.500	1.904.569	143
5	Thailand	71.601.103	513.120	140
6	Malaysia	32.576.000	330.803	98
7	Kamboja	16.589.023	181.035	91,63
8	Myanmar	53.798.084	676.578	79,51
9	Brunei Darussalam	441.000	5.765	76
10	Laos	7.338.000	236.800	31
<b>Jumlah</b>		<b>672.315.127</b>	<b>4.522.945</b>	<b>965</b>

Sumber: Worldmeter (2023)

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa negara dengan daratan terluas adalah Indonesia 1.904.569 km<sup>2</sup>, Myanmar 676.578 km<sup>2</sup>, Thailand 513.120 km<sup>2</sup>, Filipina 342.353 km<sup>2</sup>, Vietnam 331.212 km<sup>2</sup>, Malaysia 330.803 km<sup>2</sup>, Laos 236.800 km<sup>2</sup>, Kamboja 181.035 km<sup>2</sup>, Brunei Darussalam 5.765 km<sup>2</sup> dan Singapura 710 km<sup>2</sup>. Namun, berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya diketahui bahwa negara yang paling padat penduduknya adalah Singapura yang dihuni oleh 8.368 orang/km<sup>2</sup> dan Laos merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk terendah dimana per km<sup>2</sup> dihuni oleh 31 orang saja.

Dalam perspektif keamanan, ancaman COVID-19 merupakan gangguan rasa aman karena adanya wabah penyakit. Rasa aman manusia spektrumnya semakin dinamis dimana bukan lagi perang yang menakutkan umat manusia tetapi persoalan wabah penyakit yang jauh lebih mengancam dan membatasi kehidupan manusia. Sejak perang dingin usai, sebenarnya isu-isu ancaman terhadap keamanan insani/manusia (*human security*) telah menjadi topik serius dalam studi keamanan.

Pembahasan mengenai pentingnya keamanan insani/manusia (*human security*) ini makin meningkat setelah adanya laporan UNDP

tentang *Human Development Report* (1994). Dalam laporan tersebut, UNDP menyinggung tujuh dimensi yang patut dipertimbangkan dalam menciptakan keamanan insani/manusia yaitu: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik. Dalam penelitian ini, aspek ancaman COVID-19, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk telah masuk dalam tujuh dimensi *human security* tersebut. Sehingga diperlukan suatu upaya pertahanan negara yang kuat untuk menjaga penduduk di suatu wilayah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI (2007), terdapat enam faktor yang mempengaruhi pertahanan nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pertahanan yaitu: (1) anggaran pertahanan dan *Pengeluaran Militer* ; (2) jumlah penduduk suatu negara; (3) ancaman konvensional dan non konvensional; (4) anggaran pertahanan negara lain; (5) kemampuan keuangan pemerintah; (6) harga alutsista; dan (7) jumlah personil sistem pertahanan.

Pertahanan dianggap sebagai barang publik yang juga bersifat *intangible* (tidak kasat mata). Hal tersebut disebabkan karena barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan pertahanan adalah rasa aman dari segala ancaman yang timbul. Dimana hal tersebut dapat dianggap sebagai barang publik yang bersifat noneksklusif dan nonrivalitas. Noneksklusif memiliki arti dapat memberikan manfaat bagi semua warga tanpa terkecuali, sedangkan nonrivalitas yaitu konsumsi tambahan dapat dimungkinkan tanpa adanya biaya marginal.

Kesejahteraan ekonomi yang dicapai di berbagai negara di dunia tidak terlepas dari faktor sejarah yang ternyata berhubungan dengan pertahanan. Aspek pertahanan dapat memberikan dampak secara nasional kepada perekonomian, yang dikenal sebagai efek penggandaan (*multiplier effect*) maupun efek keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Dampak ini sangat dirasakan pada saat terjadi resesi ekonomi yang mengikis kekuatan ekonomi nasional. Pengeluaran militer adalah biaya untuk

membangun kekuatan pertahanan dalam masa perang maupun masa damai. Pengeluaran militer pada dasarnya untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya sarana pertahanan dalam kurun waktu tertentu (Todd dalam Putri et al., 2018).

Pengeluaran militer merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian di suatu negara serta menjaga keamanan nasional di negara tersebut (Chou dalam Putri et al., 2018). *Military spending* akan menyebabkan tingginya *Malmquist Index* (MPI) yang menandakan jika *military spending* dapat meningkatkan perekonomian di negara.

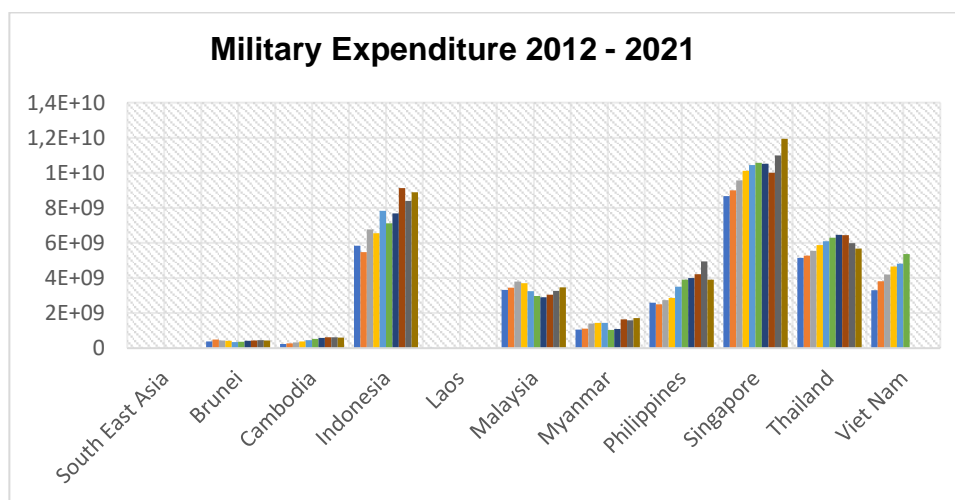


**Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Militer 2013 - 2022**

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

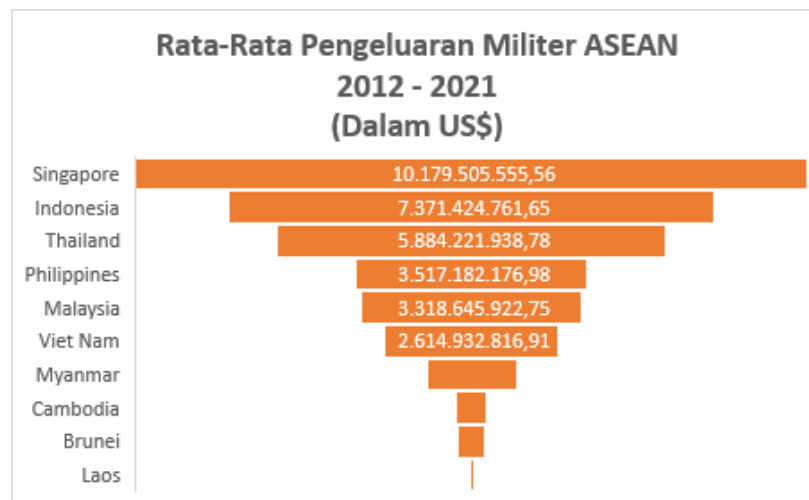
Berdasarkan grafik 1.1 tersebut, diketahui bahwa pengeluaran militer ASEAN selama 1 dekade terakhir mengalami laju pertumbuhan yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2012 pengeluaran militer ASEAN meningkat 2%, tahun 2013 sebesar 2,78%, tahun 2014 sebesar 10,81%, tahun 2015 sebesar 3,47%, tahun 2016 sebesar 6%, tahun 2017 sebesar 0,03%, tahun 2018 sebesar -11,81%, tahun 2019 pengeluaran militer mengalami penurunan hingga -11,81%, tahun

2020 menyentuh angka 5,56%, tahun 2021 meningkat 2,01% dan tahun 2022 naik lagi sebesar 1,08% dari tahun sebelumnya. Saat pandemic COVID-19 tahun 2020, negara ASEAN meningkatkan pengeluaran militernya sebesar 17,37% dari sebelumnya turun drastis hingga melonjak pada angka 5,56%. Terlepas dari menurunnya karena pandemi COVID-19 secara global, negara-negara diseluruh dunia juga meningkatkan aspek pertahanan negara mereka dengan pengeluaran militer yang meningkat 0,7 persen pada tahun 2021 (Stockholm Internasional Peace and Riset Institute (SIPRI, 2021).



**Grafik 1.2 Pengeluaran Militer per negara ASEAN 2012 - 2021**

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)



**Grafik 1.3 Pengeluaran Militer per negara ASEAN 2012 - 2021**

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan grafik 1.2 dan 1.3 diketahui bahwa Singapura memiliki rata-rata pengeluaran militer selama 2012 sampai dengan 2021 sebesar US\$ 10 miliar, Indonesia memiliki rata-rata pengeluaran militer US\$ 7,3 miliar, Thailand US\$ 5,8 miliar, Filipina US\$ 3,5 miliar, Malaysia US\$ 3,3 miliar, Vietnam US\$ 2,6 miliar, Myanmar US\$ 1,3 miliar, Kamboja US\$ 463 juta, Brunei US\$ 418 juta dan Laos US\$ 948 ribu. Total pengeluaran militer ini merupakan 7,5% dari total pengeluaran militer Asia, 2% dari total pengeluaran militer dunia, 9,4% dari total pengeluaran militer Eropa, 5% dari total pengeluaran militer Benua Amerika dan lebih tinggi dibandingkan total pengeluaran militer Afrika (SIPRI, 2022).

**Tabel 1.4 Pengeluaran Militer Terhadap GDP ASEAN**

Negara	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Myanmar	4,00%	3,79%	4,30%	4,09%	3,64%	2,36%	2,19%	2,99%	3,39%	3,05%	3,38%
Brunei	2,28%	3,09%	3,28%	3,54%	2,87%	2,64%	3,08%	3,63%	3,24%	2,37%	3,00%
Singapore	3,04%	3,05%	3,05%	3,10%	2,97%	2,81%	2,77%	2,84%	2,78%	2,77%	2,92%
Viet Nam	2,18%	2,29%	2,36%	2,44%	2,27%	2,28%	2,28%	2,18%	2,44%	2,29%	2,30%
Cambodia	1,58%	1,66%	1,80%	1,91%	2,07%	2,21%	2,20%	2,45%	2,35%	2,10%	2,03%
Thailand	1,40%	1,41%	1,43%	1,42%	1,39%	1,36%	1,35%	1,45%	1,31%	1,16%	1,37%
Malaysia	1,50%	1,46%	1,50%	1,38%	1,10%	0,96%	0,89%	1,00%	0,99%	0,96%	1,17%
Philippines	1,19%	1,04%	1,09%	1,05%	1,17%	1,18%	1,13%	1,30%	1,41%	1,00%	1,16%
Indonesia	0,92%	0,78%	0,88%	0,79%	0,87%	0,72%	0,73%	0,89%	0,74%	0,70%	0,80%
Laos	0,19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02%

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut diketahui bahwa pengeluaran militer terhadap GDP dengan rata-rata tertinggi Myanmar sebesar 3,38% dari GDP, Brunei sebesar 3% dari GDP, Singapura 2,92% dari GDP, Vietnam 2,3%, Kamboja 2,03% dari GDP, Thailand 1,37%, Malaysia 1,17%, Filipina 1,16%, Indonesia 0,8% dan Laos 0,02%.

Gap permasalahan dalam penelitian ini adalah kondisi geografis ASEAN yang berada di dua benua Asia dan Australia serta diantara dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan letak astronomi  $29,1^{\circ}$  LU –  $11^{\circ}$  LS dan  $92^{\circ}$  BT- $141^{\circ}$  BT serta dilalui garis khatulistiwa. Selain itu, sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km<sup>2</sup> dan luas wilayah daratannya sekitar  $\pm$  4.817.000 km. Salah satu keuntungan yang didapat dari letak geografis wilayah ASEAN ini ialah berada di jalur persimpangan (*crossroads*) yang sangat penting di dunia. Sehingga wilayah ASEAN baik darat maupun lautnya memiliki potensi dimata dunia. Ditambah lagi dengan adanya ancaman COVID-19 ini seharusnya ASEAN memiliki pertahanan negara yang lebih kuat. Namun kenyataannya, ASEAN masih memiliki tingkat pertahanan negara yang kurang optimal. Hal ini didukung dengan data rata-rata pengeluaran militer dimana negara dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi masih memiliki pengeluaran militer yang ideal yaitu 2-3% dari GDP (SIPRI, 2022).

Dikutip dari Global Fire Power (2023), negara ASEAN masih berada di peringkat 10 keatas. Seperti Indonesia peringkat 13 (0,222); Vietnam peringkat 19 (0,2855); Thailand peringkat 24 (0,3738); Singapura peringkat 29 (0,4613); Filipina peringkat 32 (0,4811); Myanmar peringkat 38 (0,5768); Malaysia peringkat 42 (0,6189); Kamboja peringkat 106 (2,1321); Laos peringkat 115 (2,3168); Brunei Darussalam yang tidak tercatat dalam index tersebut. Peringkat tersebut dari total 145 negara. Hal tersebut menandakan bahwa aspek sumber daya nasional yang dimiliki oleh negara

ASEAN belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Gap permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah negara ASEAN memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah China dan India yang mencapai 672 juta orang tahun 2022. Dengan total GDP sekitar US\$ 3.08 triliun di 2020, ASEAN kini menjadi ekonomi dengan urutan kelima terbesar di dunia dan diproyeksikan akan naik menjadi urutan keempat dunia di 2030. Namun kenyataannya, kuantitas populasi penduduk ini belum diiringi dengan kualitas SDM dalam upaya pertahanan negara. Selain itu, pengeluaran militer masih sangat minim hanya mencapai rata-rata terendah 0,02% hingga 3,38% apabila dibandingkan dengan beberapa Kawasan lain, negara ASEAN tersebut unggul di atas Kawasan Afrika.

Gap permasalahan ketiga berkaitan dengan ancaman COVID-19 yang terjadi tahun 2020, saat semua negara di dunia mengalami penurunan tingkat ekonomi. Namun, pengeluaran militer justru meningkat hingga penelitian ini dilakukan pengeluaran militer di beberapa negara ASEAN terus mengalami peningkatan. Pengeluaran militer pada negara-negara berkembang yang menghadapi ancaman internal yang tinggi dapat mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut mendorong belanja militer digunakan untuk menghadapi ancaman COVID-19, sehingga memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB dengan efek lain terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) (2019) dengan lokus penelitian di Korea Selatan dan Malaysia bahwa terdapat hubungan pengaruh antara pertumbuhan GDP dengan *military spending*, namun hal tersebut tidak berpengaruh di Saudi Arabia dan Iran. *Pengeluaran Militer* memiliki dampak negatif kepada *real income* dari suatu negara. *Pengeluaran Militer* mengalami kenaikan dan menyebabkan adanya kemajuan teknologi yang akan berdampak pada perekonomian di Korea

Selatan. Sehingga *state of the art* dari penelitian ini adalah terdapat beberapa variabel seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk selama menghadapi ancaman COVID-19 dalam proses penganalisaan *Pengeluaran Militer*. Dengan demikian, rancangan novelty penelitian ini adalah analisis mendalam dan hubungan korelasional tentang faktor yang mempengaruhi pertahanan negara dalam perspektif demografi yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk. Sedangkan dalam perspektif ekonomi dan pertahanan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran militer, sedangkan perspektif ancaman yaitu wabah penyakit COVID-19.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Mengacu dari permasalahan di atas, maka identifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penduduk di negara ASEAN tidak diiringi dengan bertambahnya luas wilayah sehingga menimbulkan permasalahan yang muncul dibidang kependudukan berimbas pada turunan dari kuantitas yang besar tersebut antara lain adalah persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk yang sebagian besar masih muda, modal dan teknologi yang dimiliki juga masih rendah.
2. Pertumbuhan penduduk negara ASEAN mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup yang mempengaruhi pada pertahanan negara terutama saat menghadapi pandemi COVID-19.
3. Kepadatan penduduk negara ASEAN mempengaruhi penentuan kebijakan pertahanan negara terutama dalam aspek pengeluaran militer saat menghadapi ancaman pandemi COVID-19.
4. Ancaman COVID-19 menyebabkan sebagian besar negara ASEAN mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada aspek keamanan insani dalam tujuh dimensi yaitu

keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik.

5. Peningkatan pengeluaran militer pada saat pandemi COVID-19 dapat menyebabkan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk pemulihan ekonomi. Ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN yang membutuhkan dana untuk memperbaiki jaring pengaman sosial dan sektor lain yang terdampak akibat pandemi.

### 1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk berdasarkan pada kuantitas selama 2012 sampai dengan 2021 dan persebaran penduduk yang berkorelasi dengan kesejahteraan ekonomi. Batasan yang diterapkan pada matriks parameter adalah batasan jangka panjang (*long run restriction*). Data yang digunakan dalam analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) adalah data asli (data sebelum transformasi).
2. Pertumbuhan penduduk dihitung sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun menggunakan metode persentase pada tahun 2012 sampai dengan 2021. Batasan yang diterapkan pada matriks parameter adalah batasan jangka panjang (*long run restriction*). Data yang digunakan dalam analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) adalah data asli (data sebelum transformasi).
3. Kepadatan penduduk negara ASEAN yang dihitung dengan luas wilayah dibagi dengan jumlah penduduk mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2021. Batasan yang diterapkan pada matriks parameter adalah batasan jangka panjang (*long run restriction*). Data yang digunakan dalam analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) adalah data asli (data sebelum transformasi).

4. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada Produk Domestik Bruto PDB ASEAN, PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Per jam Kerja ASEAN pada periode 2012 sampai dengan 2021. Batasan yang diterapkan pada matriks parameter adalah batasan jangka panjang (*long run restriction*). Data yang digunakan dalam analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) adalah data asli (data sebelum transformasi).
5. Pengeluaran militer dan persentase pengeluaran militer dalam PDB 2012 sampai dengan 2021. Batasan yang diterapkan pada matriks parameter adalah batasan jangka panjang (*long run restriction*). Data yang digunakan dalam analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) adalah data asli (data sebelum transformasi).

#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan proses pengidentifikasian di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran militer dengan penerapan *Structural Vector Error Correction Model* (structural VECM)?
2. Apakah terdapat efek jangka panjang dan jangka pendek dari variabel jumlah penduduk ( $X_1$ ), pertumbuhan penduduk ( $X_2$ ), kepadatan penduduk ( $X_3$ ), dan pertumbuhan ekonomi ( $X_4$ ) terhadap pengeluaran militer ( $Y$ ) selama pandemi COVID-19?
3. Bagaimana respons jika terjadi shock dari suatu variabel jumlah penduduk ( $X_1$ ), pertumbuhan penduduk ( $X_2$ ), kepadatan penduduk ( $X_3$ ), dan pertumbuhan ekonomi ( $X_4$ ) terhadap pengeluaran militer ( $Y$ ) selama pandemi COVID-19 melalui analisis respon impuls?
4. Seberapa besar pengaruh perubahan varians dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan

pertumbuhan ekonomi serta *Pengeluaran Militer ASEAN* selama pandemi covid-19 terhadap respon yang diberikan oleh suatu variabel?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran militer dengan penerapan *Structural Vector Error Correction Model* (structural VECM).
2. Untuk menganalisa efek jangka panjang dan jangka pendek dari variabel jumlah penduduk (X1), pertumbuhan penduduk (X2), kepadatan penduduk (X3), dan pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap pengeluaran militer (Y) selama pandemi COVID-19.
3. Untuk menganalisa respons jika terjadi shock dari suatu variabel jumlah penduduk (X1), pertumbuhan penduduk (X2), kepadatan penduduk (X3), dan pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap pengeluaran militer (Y) selama pandemi COVID-19 melalui analisis respon impuls.
4. Untuk menganalisa besar pengaruh perubahan varians dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi serta *Pengeluaran Militer ASEAN* selama pandemi covid-19 terhadap respon yang diberikan oleh suatu variabel.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yaitu sumbangan keilmuan mengenai analisis aspek demografi, ekonomi dan pertahanan di negara ASEAN. Penelitian ini dapat pula dijadikan referensi untuk meningkatkan upaya pertahanan negara dalam merespons ancaman berdasarkan aspek demografi seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk dan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi serta aspek pertahanan seperti *Pengeluaran Militer*.

Selain itu, peneliti juga melakukan kajian secara mendalam mengenai efek jangka panjang dan jangka pendek terhadap variabel tersebut sebagai objek kajian dalam keilmuan ekonomi makro dan mikro.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini, adalah: diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan merespons pengaruh pengeluaran militer, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Bagi Pemerintah: Diharapkan dapat memberikan bahan masukan sebagai evaluasi atau pembuatan kebijakan terkait perumusan strategi yang tepat dalam merespons segala ancaman dan perspektif ekonomi serta pertahanan di negara ASEAN.

Bagi lembaga Kemhan: Kegiatan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kemhan dalam menentukan kebijakan pertahanan negara guna melakukan peningkatan upaya pertahanan negara ASEAN.

Bagi masyarakat/pembaca kalangan akademis dan kalangan umum: Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pengaruh pengeluaran militer, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.